



**1. Lampiran 1. Informan Wawancara**

Nama	Jabatan
Gede Wardana.,S.T., M.A.P.	Kepala Bagian Keuangan
Komang Suwandewi,S.E	Bendahara
Komang Desi Arumini, S.E	Staff Bagian Keuangan
I Made Restu Arta Jaya S.Pd.	Staff Bagian Keuangan

**2. Lampiran 2. Instrumen Wawancara**

- a) Bagaimana alur proses penyusunan dan pembahasan anggaran di DPRD Buleleng menurut pengalaman Ibu/Bapak?
- b) Bagaimana Ibu/Bapak memastikan bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan regulasi yang berlaku?
- c) Tata kelola seperti apa yang dijalankan di DPRD Buleleng dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran?
- d) Bagaimana prosedur verifikasi dokumen sebelum pembayaran dilakukan di DPRD Buleleng?
- e) Menurut Ibu/Bapak, apa tujuan utama proses verifikasi dalam pengelolaan keuangan di DPRD Buleleng?
- f) Bagaimana Ibu/Bapak menyikapi jika terdapat dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan?
- g) Apakah sistem pembayaran yang diterapkan di DPRD Buleleng saat ini sudah berjalan secara optimal?
- h) Apa kendala utama yang sering muncul dalam proses anggaran di DPRD Buleleng?
- i) Bagaimana peran *Good Governance* dalam pengelolaan pembayaran di DPRD Buleleng?
- j) Apa yang Ibu/Bapak pahami mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembayaran di DPRD Buleleng?

- k) Apakah informasi terkait proses pembayaran mudah diakses oleh pihakpihak yang berkepentingan? Jika ya, bagaimana mekanisme akses informasi tersebut?
- l) Bagaimana pelaku teknis dan administratif memahami prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan tugas mereka?
- m) Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng menurut perspektif teknis dan administratif? ?

### 3. *Lampiran 3. Transkrip Wawancara*

- a) Bagaimana alur proses penyusunan dan pembahasan anggaran di DPRD

Buleleng menurut pengalaman Ibu/Bapak?

Jawaban :

Dari awal penyusunan anggaran itu pertama kita masuk ketahapan rancangan awal dulu, rencana awal RKPD namanya. Jadi pertahun itu sebelum memasuki tahun yang akan datang kita tahun sebelumnya udah merancang untuk rancangan awal RKPD untuk rancangan tahun depan gitu, nanti setelah divalidasi rancangan awal ini maka masuk lagi ketahapan berikutnya yaitu rancangan akhir namanya rancangan akhir RKPD dan nanti setelah rancangan akhir ini ada tahapan tahapan yang akan di evaluasi oleh gubernur, setelah di evaluasi dari gubernur baru di per awal tahun januari kayak kemarin itu baru nanti penetapan APBD namanya. Setelah penetapan

APBD nanti arahan yang sudah dirancang tersebut bisa di implementasikan, ini nanti juga divalidasi oleh tim TAPD, dan validasinya melauai sistem aja yang namanya sistem SIPD (Sistem informasi pemerintahan daerah). Kita melalui via sistem aja nanti validasi dari BPKPD yang menginformasikan

bahwa tahapan berikutnya sedang berjalan misalnya atau tahapan sebelumnya masih dalam proses evaluasi

b) Bagaimana Ibu/Bapak memastikan bahwa anggaran yang disusun telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan regulasi yang berlaku?

Jawaban :

Untuk memastikannya kan masing masing bagian itu punya kegiatan masing masing ya, nah untuk penyusunan anggrannya itu kita koordinasi dulu ke masing masing bagian agar nanti penyusunan anggarannya itu tercapai atau tidak diahampir di realisasikanlah berdasar kan dengan keperluan dari masing masing bidang istilahnya. Stelah itu baru penyusunan anggaran baru kita menyesuaikan lah kebutuhannya mereka itu seberapa, umpamanya 4 unitmikrofon atau 4 unit meja rapat seperti itu.

c) Tata kelola seperti apa yang dijalankan di DPRD Buleleng dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran?

Jawaban :

Kita kan pemerintah harus berbasis pada peraturan yang berlaku bahwa perencanaan anggaran itu terkat oleh peraturan tentang perencanaan dan pengelolaan kan begitu ya, kita punya pedoman. Setiap tahun pada anggaran itu ada PERMENDAGRI maka dia juga harus mengacu pada peraturanperaturan yang diatas. Jadi untuk misalnya penyusunan anggaran tahun

2026 itu berpedoman pada PERMENDAGRI No 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapaan dan belanjaan daerah tahun 2026. proses penyusunan anggaran dan pendapatan belanja SKPD itu dimulai dengan Proses penyusunan anggaran dan pendapatan belanja SKPD (Satuan

Kerja Perangkat Daerah) mengikuti pendekatan berbasis kinerja, diawali dengan penyusunan RKA-SKPD berdasarkan KUA-PPAS, diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), direviu oleh aparat pengawas internal, dan disahkan menjadi DPA-SKPD. Seluruh tahapan wajib mengacu pada standar biaya dan dilakukan secara elektronik.

d) Bagaimana prosedur verifikasi dokumen sebelum pembayaran dilakukan di

DPRD Buleleng?

Jawaban :

Pertama masuk SPJ dari bagian verifikasi di agenda dulu setelah dilakukan di dokumen ceklis dulu kalau memang sudah lengkap baru melakukan agenda, jadi setelah di agenda diberikan ke masing masing teman yang membidangi pengoreksian ada pengoreksian belanja alat bahan kantor sesuai dengan belanja belanja yang sudah ditentukan oleh SKP oleh kepala bagian keuangan. Dan kemudian udah sesuai diminta cap lunas, sebelum caplunas pun akan dimasukan ke manajemen kas, kalau memang tidak ada anggaran kas yang tersedia itu akan dikembalikan lagi ke PPTK.

e) Menurut Ibu/Bapak, apa tujuan utama proses verifikasi dalam pengelolaan keuangan di DPRD Buleleng?

Jawaban :

Tujuan utama proses verifikasi dalam pengelolaan keuangan di DPRD Buleleng jadi pelaporan keuangan itu harus bersifat transparan akuntabel dan bersifat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Segala sesuatu administrasi apapun yang menjadi sah sebagai bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran itu harus sesuai dengan acuan ketentuan aturan perundang undangan yang dimana ketentuan aturan

perundang undangan kita itu ada PERBUP terkait dengan pedoman pelaksanaan APBD, PERBUP terkait dengan perjalanan dinas, PERBUP terkait dengan pembayaran honor honor adapun juga PERBUP yang mengatur terkait dengan pengelolaan keuangan seperti itu jadi laporan keuangan yang nanti kita ciptakan di skretariat DPRD itu memang sudah bersifat ransparan akuntabel dan bersifat sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jadi itu tujuan utamanya.

f) Bagaimana Ibu/Bapak menyikapi jika terdapat dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan?

Jawaban :

Jadi kalau ada dokumen dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan maka kita disini ada SOP jadi sebelum kita melakukan verifikasi itu ada SOP kita terkait *document checklist* kelengkapan jadi kalau memang belum lengkap kita akan kembalikan dulu kepemilik atau bagian dari PPTK disuruh melengkapi dan seandainya pun sudah lengkap dan masih ada administrasi atau SPJ yang kurang sesuai dengan ketentuan atau salah itu akan di kembalikan ke masing masing PPTK untuk melakukan pengoreksian nanti kalau memang sudah benar masuk kesini lagi dan baru boleh dilakukan pembayaran ke bagian bendahara.

g) Apakah sistem pembayaran yang diterapkan di DPRD Buleleng saat ini sudah berjalan secara optimal?

Jawaban :

Sangat sangat optimal bagus malahan karena dari setiap tahun sistem kita kan ada perubahan penggunaan sistem yah tapi sepanjang ini banyak yang sudah bagus entah dari SIPD, SIPD RI tapi sampai sekarang berjalan ptimal dan baik

h) Apa kendala utama yang sering muncul dalam proses anggaran di DPRD

Buleleng?

Jawaban :

Kendalanya yang sering muncul disistemnya sih yang kayak pembukaan aksesnya itu kita berbarengan sama semua OPD lain, jadinya saat penyusunan anggaran itu agak sedikit terlambat mungkin ngaret istilahnya.

Kalau kendala dalam penyusunan anggaran itu dilihat dari tahun kmarin kendalanya kayak untuk kebutuhannya udah terpenuhi cuman kadang istilah

standar harganya tidak sesuai dengan harga yang udah kita anggarkan, kan kita di SKPD itu masing masing kegiatan itu ada beberapa standar harga

kaya kertas, atk, tinta kita darimasing masing OPD itu sebelumnya udah mengusulkan standar harga namanya kadang standar harganya itu direkanan

itu bisa berbeda akhirnya dipenyusunan anggaran itu nah perbedaan harga realisasinya itu tidak tercapai 100%, jadi masih ada sisa sisa anggaran karena

perbedaan standar harga.nanti sisanya itu dikembalikan BPKPD untuk di anggarkan tahun depan lagi.

i) Bagaimana peran *Good Governance* dalam pengelolaan pembayaran di

DPRD Buleleng?

Jawaban :

Peran *Good Governance* dalam pengelolaan pembayaran di DPRD Buleleng

sangat penting, karena menjadi dasar dalam setiap proses pembayaran yang kami lakukan. Prinsip transparansi diterapkan dengan memastikan seluruh

dokumen pembayaran lengkap dan dapat diperiksa, sedangkan akuntabilitas dijalankan melalui pertanggungjawaban setiap pengeluaran anggaran sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembayaran juga tidak bisa dilakukan

tanpa melalui tahapan verifikasi dan persetujuan yang jelas, sehingga mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan. Dengan penerapan *Good Governance* tersebut saya rasa pengelolaan pembayaran di DPRD Buleleng dapat berjalan secara tertib, aman, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

j) Apa yang Ibu/Bapak pahami mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembayaran di DPRD Buleleng?

Jawaban :

Yang kami pahami sebagai prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan pembayaran adalah adanya aturan yang jelas dan wajib dipatuhi dalam setiap tahapan pembayaran. Setiap proses pembayaran harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan, mulai dari kelengkapan dokumen, proses verifikasi, hingga pencairan dana. Selain itu, prinsip kehati-hatian juga sangat penting, di mana bendahara tidak boleh melakukan pembayaran apabila dokumen belum lengkap atau belum sesuai ketentuan.

k) Apakah informasi terkait proses pembayaran mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan? Jika ya, bagaimana mekanisme akses informasi tersebut?

Jawaban :

Untuk informasi proses pembayaran, pada prinsipnya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh bagian yang mengajukan dan pimpinan. Mekanisme aksesnya dilakukan melalui sistem administrasi keuangan yang digunakan, serta melalui koordinasi langsung dengan bendahara. Setiap pengajuan pembayaran dapat dipantau statusnya, apakah masih dalam tahap verifikasi atau sudah diproses untuk pencairan. Selain itu, dokumen pembayaran juga tercatat dan terdokumentasi dengan baik,

sehingga apabila diperlukan klarifikasi atau pengecekan, informasinya dapat ditelusuri dengan jelas

l) Bagaimana pelaku teknis dan administratif memahami prinsip *Good Governance* dalam pelaksanaan tugas mereka?

Jawaban :

Sebagai pelaksana teknis dan administratif, kami memahami prinsip *Good Governance* sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip tersebut kami terapkan melalui ketepatan prosedur, kelengkapan administrasi, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan pekerjaan. Setiap tugas yang kami lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara hukum, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang benar dan transparan

m) Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di DPRD Buleleng menurut perspektif teknis dan administratif? ?

Jawaban : Dari sisi teknis dan administratif penerapan prinsip *Good Governance* dalam proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran dilakukan dengan mengikuti tahapan kerja yang telah ditetapkan secara jelas. Setiap dokumen anggaran dan pembayaran diperiksa kelengkapannya, kesesuaiannya dengan DPA, serta kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku. Proses verifikasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi maupun penyimpangan, sehingga pembayaran yang dilakukan benar-benar sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. *Lampiran 4. Indikator wawancara*

No	Indikator	Pertanyaan
1	<b>Partisipasi Masyarakat</b>	<p>1. Apakah masyarakat atau pihak eksternal memiliki kesempatan untuk mengetahui atau memberikan masukan terhadap proses penyusunan anggaran di Sekretariat di DPRD Buleleng?</p> <p>2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat atau stakeholder dalam proses perencanaan anggaran daerah yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD Buleleng?</p> <p>Menurut Bapak/Ibu sejauh mana aspirasi masyarakat dapat mempengaruhi proses penyusunan anggaran di Sekretaria DPRD Buleleng?</p>
2	<b>Penegakan Hukum (Rule of Law)</b>	<p>1. Peraturan apa saja yang menjadi dasar dalam proses penyusunan anggaran, verifikasi, dan pembayaran di Sekretariat DPRD Buleleng?</p> <p>2. Bagaimana penerapan aturan tersebut dalam memastikan bahwa bahwa setiap proses keuangan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku?</p>

		3. Apakah terdapat mekanisme pengawasan atau sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap prosedur pengelolaan keuangan?
3	<b>Transparansi</b>	<p>1. Bagaimana keterbukaan informasi terkait proses anggaran, verifikasi, dan pembayaran di Sekretariat DPRD Buleleng kepada pihak terkait.</p> <p>2. Apakah sistem informasi seperti SIPD membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan?</p>
4	<b>Responsitas</b>	<p>1. Bagaimana Sekretariat DPRD Buleleng merespon kebutuhan atau usulan dari masing-masing bagian dalam proses penyusunan anggaran?</p> <p>2. Apa yang dilakukan apabila terdapat kendala atau permasalahan dalam proses anggaran verifikasi atau pembayaran?</p>
5	<b>Orientasi pada Konsensus (Consensus-Oriented)</b>	1. Bagaimana proses koordinasi antarbagian dalam menentukan kebutuhan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng?

		<p>2. Apakah terdapat forum atau mekanisme diskusi untuk menyepakati prioritas anggaran sebelum ditetapkan?</p> <p>3. Apakah terdapat forum atau mekanisme diskusi untuk menyepakati prioritas anggaran sebelum ditetapkan?</p>
6	<p><b>Keadilan (Equity)</b></p> 	<p>1. Bagaimana Sekretariat DPRD Buleleng memastikan bahwa alokasi anggaran didistribusikan secara adil kepada setiap bagian atau kegiatan?</p> <p>2. Apakah terdapat pertimbangan tertentu dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran agar tidak terjadi ketimpangan antarbagian?</p> <p>3. Bagaimana mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang?</p>
7	<p><b>Efektivitas dan Efisiensi</b></p>	<p>1. Bagaimana Sekretariat DPRD Buleleng memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien?</p>

		2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk meminimalisir pemborosan atau sisa anggaran yang tidak terealisasi?
8	<b>Akuntabilitas</b>	<p>1. Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng?</p> <p>2. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran?</p>
9	<b>Visi Strategis</b>	<p>1. Bagaimana perencanaan anggaran di Sekretariat DPRD Buleleng disusun agar sejalan dengan visi dan tujuan pembangunan daerah?</p> <p>2. Apakah penyusunan anggaran mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang organisasi atau hanya kebutuhan tahunan?</p>

## 5. Lampiran 5. Penerimaan Permohonan Data Penelitian


**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG**  
 Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja Telp. (0362) 22713  
 Email : [dprd@bulelengkab.go.id](mailto:dprd@bulelengkab.go.id) website:<http://dprd.buleleng.go.id>

---

Nomor : B.400.14.5.4/ 757 /II/SETWAN/ 2026  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penerimaan Permohonan Data Dan Penelitian**

Singaraja, 2 Pebruari 2026  
 Kepada  
 Yth. Dr.Dra. Ni Made Suci, M.Si  
 Wakil Dekan I, Fakultas Ekonomi  
 Universitas Pend. Ganesha Singaraja  
 di -  
Singaraja

Menunjuk Surat dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja nomor: 157/UN48.13.1/PT.01.04/2026 Perihal : Permohonan Data dan Penelitian, kami dari Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng menerima Mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Program Studi S1 Akuntansi atas nama :

1. Nama : Ida Ayu Rat Regita Cahyani  
 NIM : 2217051271  
 Fakultas : Ekonomi  
 Jurusan : S1 Akuntansi

Demikian Surat Penerimaan Permohonan Data dan Penelitian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An.Sekretaris DPRD Kab.Buleleng  
 Kepala Bagian Umum

  
**Nvoman Ary Juru, S.H., M.A.P**  
 NIP. 19741001199903 1 007

6. Lampiran 6. Dokumentasi



## RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Rat Regita Cahyani lahir di Singaraja pada tanggal 30 Maret 2002. Penulis merupakan anak dari pasangan suami istri Ida Bagus Putu Suwitra dan Ida Ayu Ketut Okarini Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Penulis beralamat di Liligundi Singaraja, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Diponegoro Sumbawa Besar dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 6 Singaraja dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) pada Program Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2026, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: "PERAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES ANGGARAN, VERIFIKASI, DAN PEMBAYARAN DI DPRD BULELENG". Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.